
PENGUATAN NILAI BUDAYA 3S (SIPAKATAU, SIPAKAINGE, DAN SIPAKALEBBI) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Fatimah, Nurul Hidayah, Safriani, Rini Indriani, Nabila Shalsabila, Rosma, Aulia Nur Rahmah,
Muhammad Roem Prakarsa Ibrahim

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Parepare

eeni66813@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

3S cultural values,
Regional Financial
Management.

Abstract. This activity aims to integrate 3S cultural values in regional financial management through an internship program. The paper explores the application and impact of strengthening the 3S values (Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebby) in the regional financial management of Parepare City. The methods used in this paper include observation, interviews and documentation during internship activities at the Regional Financial Agency of the Parepare City Regional Government. The results show that the implementation of 3S cultural values is: employees respect each other's opinions and contributions by establishing effective cooperation and communication so as to create a positive work environment; there is a mechanism for reminding each other in carrying out tasks, which increases awareness of each other's responsibilities; Cooperation between employees is clearly visible in the completion of financial projects, where they help each other to achieve common goals. This program also provides practical experience for students in understanding the importance of local culture in the context of government. Strengthening the 3S cultural values (Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebby) is not only relevant but also very important in improving the quality of regional financial management in Parepare City.

Corresponden author:

Email: eeni66813@gmail.com

Keywords:

: Nilai budaya 3S,
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai budaya 3S dalam pengelolaan keuangan daerah melalui program magang. Karya tulis mengeksplorasi penerapan dan dampak penguatan nilai 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebby) dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di instansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya 3S yaitu: pegawai saling menghargai pendapat dan kontribusi satu sama lain dengan menjalin kerja sama dan komunikasi yang efektif sehingga tercipta lingkungan kerja yang



positif; terdapat mekanisme saling mengingatkan dalam pelaksanaan tugas, yang meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing; kerja sama antar pegawai terlihat jelas dalam penyelesaian proyek-proyek keuangan, di mana mereka saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Program ini juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami pentingnya budaya lokal dalam konteks pemerintahan. Penguatan nilai budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi) tidak hanya relevan tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Parepare. artikel

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan perlunya pendekatan baru yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan keuangan daerah . (Segah & Kaharap, 2022). Namun dalam melaksanakan 3S disiplin itu juga perlu Disiplin kerja tentu memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan agar target realisasi kinerja bisa tercapai atau terpenuhi.

Menurut Arifai (2018) mengemukakan bahwa disiplin kerja pada karyawan sangat di butuhkan, karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan susah di capai bila tidak ada disiplin kerja. dan Menurut Hasibuan (2014 : 193) Dalam hubungan disiplin kerja dengan kinerja menurut Hasibuan (2012 : 193) disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang di berikan kepadanya. Penelitian Mulyasari (2018), menunjukan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Suryono (2017), yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sejalan juga dengan penelitian oleh Sani (2018), menyebutkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Selatan, khususnya dalam kehidupan masyarakat suku Bugis terdapat sebuah falsafah hidup yang termanifestasi, yakni nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi yang merupakan budaya suku Bugis yang memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki karakter kuat, sehingga nilai ini sangat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu.⁴ Dengan demikian nilai budaya sangat berperan penting di kehidupan sosial masyarakat, olehnya itu sebagai masyarakat perlu kiranya menelaah dan menggali kembali nilai-nilai budaya sebagai pedoman hidup di masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang falsafah hidup yang terdapat di dalam nilai budaya Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi dalam upaya pencegahan sikap intoleransi. Kearifan lokal merupakan kekayaan masyarakat yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang menjadi pandangan hidup masyarakat lokal.

Adat istiadat, bahasa, budaya, nilai, dan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu contoh kearifan lokal. (Wa Ode Rayyani et al., 2022). Nilai yang menjadi suatu kepercayaan dan bahkan menjadi nilai dan pegangan hidup bagi masyarakat tersebut. Sama halnya dengan suku Bugis yang memiliki banyak falsafah hidup yang pada akhirnya menjadi pegangan hidup dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pegangan hidup etnik Bugis tersebut di antaranya adalah Sipakatau,

Sipakalebbi, dan Sipakainge atau 3S. (Tamrin et al., 2021). Sipakatau merupakan sifat untuk memandang manusia seperti manusia. Maksudnya dalam kehidupan sosial kita selayaknya memandang manusia seperti manusia seutuhnya dalam kondisi apapun. Pada intinya kita seharusnya saling menghormati sesama manusia sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung. (Di & Dasar, 2021)

Sipakainge merupakan sifat saling mengingatkan. Budaya sipakainge hadir sebagai pedoman bagi masyarakat Bugis sebagai bukti bahwa manusia adalah pribadi yang tidak dapat lepas dari kekurangan dan kesalahan. Sipakainge atau saling mengingatkan merupakan salah satu dari tindakan preventif bagi karyawan yang melanggar norma yang telah ditetapkan. (Di & Dasar, 2021). Sipakalebbi merupakan landasan moral dan etika yang memandu perilaku sehari-hari. Konsep ini melibatkan sikap hormat terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan status sosial, usia, atau latar belakang lainnya. Sipakalebbi mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Dalam praktiknya, Sipakalebbi menekankan pada kolaborasi dan kerja sama, di mana setiap pegawai diharapkan dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. (Nur et al., 2023).

Di Kota Parepare, penerapan budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi) dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah strategis yang berdampak luas bagi masyarakat dan pemerintah. Budaya ini tidak hanya meningkatkan citra institusi pemerintah sebagai organisasi yang profesional dan responsif, tetapi juga memperbaiki hubungan antarpribadi di kalangan pegawai. Lingkungan kerja yang harmonis akan mendorong kolaborasi yang lebih baik sehingga semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat meningkat. Penerapan nilai-nilai budaya ini dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penguatan nilai budaya 3S tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan interaksi yang penuh rasa hormat, kualitas pelayanan keuangan juga akan lebih baik. Proses transaksi yang dilakukan dengan sikap ramah membuat masyarakat merasa dihargai dan memudahkan interaksi dengan petugas. Selain itu, budaya 3S membantu mencegah stigma negatif dan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan iklim sosial yang positif. Pelatihan rutin untuk menerapkan budaya 3S juga berfungsi sebagai pendidikan bagi pegawai, meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang prima. Dengan demikian, penguatan budaya 3S tidak hanya memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, dan mendukung partisipasi aktif masyarakat.

MEOTDE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode magang sebagai strategi utama. Mahasiswa melakukan magang di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare selama satu bulan.

Adapun teknik pelaksanaan dilakukan dengan:

1. Observasi

Mengamati proses pengelolaan keuangan dan interaksi antarpegawai.



Gambar 1 Melakukan Observasi

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pegawai untuk memahami bagaimana nilai 3S diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen terkait pengelolaan keuangan dan laporan kegiatan yang mencerminkan penerapan nilai 3S



Gambar 2 Wawancara dengan Pegawai

Hasil Dan Pembahasan

1. Penjelasan Nilai Budaya 3S

a. Sipakatau

Sipakatau menekankan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan status atau posisi. *Pertama*, pegawai saling menghargai pendapat dan kontribusi satu sama lain dengan menjalin kerja sama dan komunikasi yang efektif sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif. *Kedua*, terdapat kesempatan pengembangan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Penerapan sipakatau dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, nilai ini mendorong para pemangku kepentingan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa dihargai dan didengarkan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran.

1) Transparansi:

Penerapan sipakatau dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong transparansi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai anggaran.

2) Akuntabilitas

Dengan menghargai setiap kontribusi individu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Ini menciptakan rasa percaya antara pemerintah dan warganya.

b. Sipakainge

Budaya Sipakainge berfungsi sebagai pedoman untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kesalahan secara konstruktif. *Pertama*, terdapat mekanisme saling mengingatkan dalam pelaksanaan tugas, yang meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. *Kedua*, semua proses pekerjaan dilakukan secara terbuka dan transparan. *Ketiga*, terdapat pengawasan yang ketat terhadap pekerjaan untuk mencegah penyelewengan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, nilai ini dapat diterapkan melalui mekanisme kontrol sosial di mana masyarakat saling mengingatkan tentang tanggung jawab mereka terhadap penggunaan anggaran.

1) Checks and Balances

Dengan adanya budaya sipakainge, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dana publik.

2) Partisipasi Aktif

Masyarakat didorong untuk terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Dengan demikian, mereka dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

c. Sipakalebbe

Nilai Sipakalebbe mengajarkan penghargaan terhadap martabat secara individu, menciptakan hubungan yang saling mendukung dan kooperatif. *Pertama*, kerja sama antarpegawai terlihat jelas dalam penyelesaian proyek-proyek keuangan, di mana mereka saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. *Kedua*, pelayanan publik yang berkualitas dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerapan sipakalebbe dapat dilihat melalui penghargaan terhadap individu atau kelompok yang berkontribusi positif dalam pengelolaan anggaran.

1) Penghargaan atas Kontribusi

Dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang menunjukkan integritas dan dedikasi dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi aktif.

2) Membangun Solidaritas

Nilai ini juga membantu membangun rasa solidaritas di antara warga, yang sangat penting untuk menciptakan komunitas yang kohesif dan saling mendukung.

Penguatan budaya lokal seperti 3S menjadi salah satu cara efektif untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih inklusif, profesional dan berorientasi pada masyarakat. Dalam konteks

pengelolaan keuangan, nilai-nilai ini memberikan landasan etika yang memperbaiki transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Dampak Terhadap kinerja Pegawai

Penerapan nilai-nilai ini berdampak positif pada kinerja pegawai, antara lain :

a. Meningkatkan Transparansi

Transparansi adalah salah satu aspek kunci dalam pengelolaan keuangan yang baik. Nilai sipakatau, yang menekankan pada saling menghargai dan menghormati, mendorong semua pihak untuk terbuka dalam proses pengelolaan anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat bagaimana dana publik digunakan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan nilai budaya ini berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan

b. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Nilai sipakainge yang berarti saling mengingatkan, mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks BKD Parepare, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui forum diskusi atau musyawarah yang melibatkan berbagai stakeholders. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang berharga mengenai kebutuhan dan prioritas mereka, sehingga anggaran yang disusun lebih relevan dan tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan kinerja anggaran dengan memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah

c. Membangun Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai sipakalebbi, yang mengedepankan saling memuliakan dan menghargai kontribusi setiap individu, mendorong semua pihak di BKD untuk bertanggung jawab atas tugas dan fungsi mereka. Dengan adanya budaya akuntabilitas, setiap pegawai di BKD akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah

d. Meningkatkan Kualitas Keputusan

Penerapan nilai-nilai 3S juga berdampak pada kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pendekatan tudang sipulung (musyawarah), di mana semua pihak terlibat dalam diskusi terbuka, keputusan yang diambil menjadi lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa musyawarah berbasis nilai budaya dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran. Kualitas interaksi publik, pelayanan yang berlandaskan penghargaan dan komunikasi terbuka menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menghargai suara rakyat, sementara sipakainge menciptakan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Kesimpulan

Penguatan nilai budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi) tidak hanya relevan tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Parepare. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsive. Penguatan nilai budaya 3S (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi) tidak hanya relevan tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Parepare. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsive. Program magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktik terbaik di lapangan, sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya budaya lokal dalam konteks pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Di, D., & Dasar, T. S. (2021). Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Eduvis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. *Journal.Bungabangsacirebon.Ac.Id*, 6(1), 185–191.
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/eduvis/article/view/182>
- Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge') sebagai Simbol Kearifan Lokal. *Mimesis*, 4(2), 166–179.
<https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8105>
- Segah, B., & Kaharap, K. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DARI PENGAWASAN: Good Regional Financial Management as an Element of Supervision. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 42–46.
- Tamrin, R. U., Bulutoding, L., Juardi, M. S. S., & Jannah, R. (2021). Makna budaya to ciung maccae ri Luwu dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1), 174–193.
<https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26849>
- Wa Ode Rayyani, Basri Basir, & Abdul Thalib. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 89–100.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009>

